

2-28-2022

## PROBLEMATIKA AKSELERASI PENANGANAN KEMISKINAN NELAYAN DI MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA MAKASSAR

Muhammad Iqbal Latief

*Departemen Sosiologi, Universitas Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan, 90245, Indonesia, muhilberkelana@gmail.com*

Rabina Yunus

*Departemen Sosiologi, Universitas Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan, 90245, Indonesia*

Hasbi Marissangan

*Departemen Sosiologi, Universitas Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan, 90245, Indonesia*

Sultan Djibe

*Departemen Sosiologi, Universitas Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan, 90245, Indonesia*

Arsyad Genda

*Departemen Sosiologi, Universitas Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan, 90245, Indonesia*

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jpm>



Part of the [Social Welfare Commons](#), and the [Social Work Commons](#)

---

### Recommended Citation

Latief, Muhammad Iqbal; Yunus, Rabina; Marissangan, Hasbi; Djibe, Sultan; and Genda, Arsyad (2022) "PROBLEMATIKA AKSELERASI PENANGANAN KEMISKINAN NELAYAN DI MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA MAKASSAR," *Jurnal Pembangunan Manusia*: Vol. 3: No. 1, Article 27.

DOI: 10.7454/jpm.v3i1.1026

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jpm/vol3/iss1/27>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Social and Political Sciences at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Jurnal Pembangunan Manusia by an authorized editor of UI Scholars Hub.

## PROBLEMATIKA AKSELERASI PENANGANAN KEMISKINAN NELAYAN DI MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA MAKASSAR

Muhammad Iqbal Latief

*Corresponding Author*

Departemen Sosiologi, Universitas Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan, 90245, Indonesia  
muhilberkelana@gmail.com

Rabina Yunus

Departemen Sosiologi, Universitas Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan, 90245, Indonesia

Hasbi Marissangan

Departemen Sosiologi, Universitas Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan, 90245, Indonesia

Sultan Djibe

Departemen Sosiologi, Universitas Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan, 90245, Indonesia

Arsyad Genda

Departemen Sosiologi, Universitas Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan, 90245, Indonesia

### **ABSTRAK**

*Tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, masih sulit diwujudkan khususnya tujuan mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk apapun. Pandemi Covid-19 yang sudah setahun lebih, justru memperparah kondisi kemiskinan di masyarakat. Di kota Makassar angka kemiskinan meningkat drastis dari 4,1 persen menjadi 7,2 persen selama tahun 2020 (Data Depsos Makassar). Ironisnya, masyarakat miskin yang bermukim di pulau-pulau seperti masyarakat pulau Kodingareng, Barrang Lompo, Barrang Caddi, Lumu-Lumu, Laikang dan lain-lain, kini semakin miskin karena adanya Covid-19. Karena itu, tulisan ini berupaya menggambarkan problematika akselerasi penanganan kemiskinan nelayan di masa pandemi covid-19 di kota Makassar dalam akselerasi SDGs. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dan data yang diolah yaitu data sekunder dan data primer. Penelitian ini berawal identifikasi dan perumusan masalah, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data meliputi klasifikasi dan reduksi data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil kajian ini menyimpulkan bahwa, makin miskinnya nelayan di pulau-pulau, karena menurunnya jumlah hasil tangkapan ikan, menurunnya harga ikan, biaya operasional melaut makin tinggi, pinjaman dana pihak ketiga yang membengkak, pembatasan sosial selama pandemi dan dampak dari penambangan pasir laut di Makassar. Selain itu, struktur sosial masyarakat nelayan pulau, masih terperangkap oleh kondisi kemiskinan struktural. Sebagai saran, perlu dilakukan akselerasi intervensi dalam menerapkan pelaksanaan SDGs desa agar nelayan miskin pulau-pulau di kota Makassar dapat keluar dari kemiskinannya.*

**KATA KUNCI:** *Penanganan, Kemiskinan, Nelayan, Covid-19, Makassar*

### **ABSTRACT**

*Sustainable development goals, or SDGs, are still difficult to realize, especially the goal of ending poverty in all its forms. The Covid-19 pandemic, which has been around for more than a year, has actually exacerbated the condition of poverty in the community. In the city of Makassar, the poverty rate increased dramatically from 4.1 percent to 7.2 percent during 2020 (Makassar Ministry of Social Affairs data). Ironically, the poor who live on islands such as the people of Kodingareng, Barrang Lompo, Barrang Caddi, Lumu-Lumu, Laikang and others, are now getting poorer because of the Covid-19 outbreak. Therefore, this paper seeks to describe the problems of accelerating the handling of fishermen's poverty during the COVID 19 pandemic in the city of Makassar in accelerating the SDGs. The method used is descriptive qualitative, and the data processed are secondary data and primary data. This research begins with identification and problem formulation, data collection, data processing and analysis including data classification and reduction, conclusion drawing and verification. The results of this study conclude that, the poorer fishermen on the islands, due to the decreasing number of fish catches, decreasing fish prices, higher operating costs at sea, swelling third party loan funds, social restrictions during the pandemic and the impact of sea sand mining in Makassar. In addition, the social structure of island fishing communities is still trapped by structural poverty conditions. As a suggestion, it is necessary to accelerate intervention in implementing the implementation of village SDGs so that poor fishermen in the islands of Makassar city can get out of poverty.*

**KEY WORDS:** *Handling, Poverty, Fishermen, Covid-19, Makassar*

## PENDAHULUAN

Masalah kemiskinan, masih menjadi kajian yang tidak selesai. Kebijakan pengurangan kemiskinan baik yang dirumuskan di tingkat global, mulai dari kebijakan Millenium Development Goals (MDGs) sampai tahun 2015 dan dilanjutkan kebijakan SDGs (Sustainable Development Goals) sampai sekarang ini, belum memberi efek positif penurunan angka kemiskinan di peringkat global. Menurut data Bank Dunia (2019), masih terdapat lebih kurang 18 % penduduk dunia yang dikategorikan miskin dan dibawah garis kemiskinan. Artinya, kalau penduduk dunia sekarang ini mencapai lebih dari 6,5 miliar maka masih ada lebih kurang 1,2 miliar penduduk dunia yang miskin. Tentu kondisi ini membawa konsekuensi dan implikasi yang sangat luas dalam kehidupan manusia dan masyarakat secara umum. Ironisnya, karena dunia sekarang ini diperhadapkan pada wabah pandemi Covid-19 yang justru meningkatkan jumlah masyarakat miskin.

Dalam konteks Indonesia, sejak merdeka tahun 1945 sampai sekarang ini, masalah serius yang masih dihadapi adalah persoalan kemiskinan. Apalagi setelah Indonesia mengalami krisis moneter tahun 1997, menurut data jumlah orang miskin meningkatkan tajam dari 22,5 juta tahun 1996, menjadi 89,5 juta pada tahun 1997. Angka pengangguran pada tahun 1997 juga meningkat mencapai sekitar 20 juta orang (BPS, 1998). Menurut Ismawan (1999, 24), krisis ekonomi tahun 1997 menyebabkan Indonesia terperosok menjadi negara miskin. Selain itu, masalah terjadi akumulasi modal pada kelompok tertentu, pembangunan fisik dan sosial yang tidak seimbang antara Jawa dan Luar Jawa, dan juga antara kota dan desa. Ini semua menurut Drucker (1998,53), yang menyebabkan terjadinya ketegangan yang cukup tinggi di Indonesia. Menurut Baharsjah (1999,21), krisis ekonomi di Indonesia sebenarnya lebih disebabkan oleh faktor internal antara lain; (i) besarnya jumlah penduduk miskin; (ii) besarnya jumlah penduduk berpendidikan rendah; (iii) ketimpangan pembangunan antar daerah; (iv) kesenjangan sosial ekonomi secara vertikal antar warga masyarakat; (v) parahnya kerusakan lingkungan hidup serta terkurasnya sumber daya alam, terutama bahan tambang dan hutan, dan; (vi) rawannya hampir semua wilayah Indonesia terhadap bencana baik bencana karena peristiwa alam atau karena ulah manusia atau perpaduan keduanya.

Di era reformasi, penurunan angka kemiskinan juga tidak terlalu menggembirakan. Disparitas antara desa dan kota dalam konteks kemiskinan, masih cukup besar. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Kondisi Kemiskinan di Indonesia Tahun 2012 – Maret 2019  
Perbandingan Perkotaan dan Perdesaan  
(dalam jutaan orang)

No	Tahun	Perkotaan	%	Perdesaan	%	Total	%
1	2012	10,65	8,78	18,49	15,12	29,14	11,95
2	2013	10,33	8,39	17,74	14,32	28,07	11,36
3	2014	10,51	8,39	17,77	14,17	28,28	11,28
4	2015	10,65	8,29	17,94	14,21	28,59	11,25
5	2016	10,34	7,79	17,28	14,11	27,62	10,95
6	2017	10,27	7,26	16,31	13,47	26,58	10,37
7	2018	10,13	6,89	15,54	13,10	25,67	9,99

8	2019	9,99	6,69	15,15	12,85	25,14	9,77
---	------	------	------	-------	-------	-------	------

Sumber : Data BPS tahun 2012 sampai Maret 2019

Ditengah upaya menurunkan angka kemiskinan di Indonesia, masalah baru yang muncul dua tahun belakangan ini adalah mewadahnya pandemi covid-19 yang menular di seluruh wilayah Indonesia. Efeknya, tidak hanya pada masalah kesehatan masyarakat tetapi sudah mewabah ke seluruh dimensi kehidupan masyarakat. Salah satunya, makin meningkatnya jumlah penduduk miskin di Indonesia. Menurut data Biro Pusat Statistik (BPS) per September 2020, jumlah orang miskin di Indonesia, meningkat pada tahun 2021 menjadi 27,55 juta atau 10,19 persen dari total jumlah penduduk atau meningkat 2,76 juta jiwa dibanding tahun sebelumnya. Meningkatnya jumlah masyarakat miskin selama pandemi, karena penurunan pendapatan yang dialami oleh hampir seluruh lapisan masyarakat namun masyarakat yang berada di lapisan bawah terdampak lebih dalam dibanding lapisan atas. Kebijakan Pemerintah melalui Program pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) telah melakukan intervensi

terhadap warga masyarakat yang tidak mampu, sehingga jumlah orang miskin tidak sampai mencapai 4 juta jiwa sesuai dengan prediksi akibat adanya pandemi covid-19 di Indonesia. Sedangkan gini rasio tahun 2020, meningkat menjadi 0,385 dibanding September 2019 sebanyak 0,380.

Fenomena yang terjadi secara nasional, juga tampak pada kondisi provinsi dan kabupaten/kota. Kondisi kemiskinan di Sulsel, juga mengalami kenaikan selama masa pandemic covid-19. Data dari Biro Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan (data September 2020) menjelaskan bahwa jumlah orang miskin di Sulsel selama pandemi mencapai 800.240 orang atau terjadi peningkatan sebesar 40.660 orang miskin dibanding tahun 2019. Hal ini menegaskan bahwa telah terjadi persentase kenaikan jumlah orang miskin sebesar 0,43 % selama periode September 2019 sampai September 2020. Jumlah tersebut terbesar di daerah perkotaan sebanyak 32.69 ribu orang miskin dan di pedesaan mengalami kenaikan 7,91 ribu jiwa. Meningkatnya jumlah orang miskin di Sulsel, karena faktor pandemi covid-19, juga karena banyaknya pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja, tingkat pengangguran terbuka (TPS) juga makin besar. Hal ini yang menyebabkan terjadi penurunan konsumsi rumah tangga.

Hal ini juga terjadi di kota Makassar, bahkan akibat dari pandemi covid-19 kemiskinan di kota Makassar meningkat sangat signifikan dari 4,4 % pada tahun 2019 meningkat menjadi 7,4 % pada tahun 2020. Selama masa pandemi, angka kemiskinan di kota Makassar mencapai 154.632 keluarga pada tahun 2020, meningkat sebesar 72.306 keluarga dibanding tahun 2019 yang keluarga miskin mencapai 82.326 keluarga. Jumlah warga miskin yang tinggal di Kawasan pesisir terbanyak di kecamatan Ujung Tanah 11,14 %, kemudian Tallo 7,71 % dan Mariso 6,93 %. Berbagai kondisi kemiskinan tadi, memberi implikasi yang serius terhadap upaya akseleratif penurunan angka kemiskinan khususnya pada masyarakat yang bermukim di pulau-pulau di kota Makassar. Karena itu, tulisan ini mencoba untuk meneliti dan mengkaji problematika akselerasi penanganan kemiskinan bagi masyarakat nelayan di pulau-pulau kota Makassar.

## PEMBAHASAN DAN HASIL

Pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung sejak Maret 2020 sampai sekarang ini, memberi implikasi yang sangat serius dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat kota Makassar. Selama masa pandemi (sejak Maret sampai sekarang), jumlah masyarakat miskin meningkat tajam. Kalau tahun 2019, angka kemiskinan di Makassar mencapai 4,4 % atau sekitar 82.326 rumah tangga maka pada masa pandemi covid-19 jumlah orang miskin meningkat 3 % atau sekitar 72.306 rumah tangga sehingga angka kemiskinan di kota Makassar sekarang ini mencapai 154.362 rumah tangga. (sumber : wawancara Kadis Sosial Makassar Mukhtar Tahir di Tribun Timur.com Jumat 15/5-2020 jam 23:51). Tingginya angka kemiskinan baru tersebut, karena ratusan usaha tutup, ribuan karyawan mengalami PHK. Data dari Dinas ketenagakerjaan kota Makassar (tahun 2020), menyebutkan 9.000 tenaga kerja di rumahkan dan 4.732 diantaranya hanya mendapat 20 % gaji selebihnya tanpa upah dan

mengalami PHK. Jumlah penduduk laki-laki 755.968 dan perempuan 770.709 sehingga total 1.526.677 tersebar di 15 kecamatan dan 100 kelurahan. Total jumlah penduduk miskin dan rentan di kota Makassar sebesar 228.091 jiwa sedangkan penduduk miskin sebanyak 66.224 (data BPS kota Makassar, 2019).

Kondisi ini juga tampak pada kehidupan masyarakat yang mendiami pulau-pulau dan pesisir pantai di kota Makassar. Sebagaimana diketahui bahwa masyarakat miskin yang berada pulau-pulau dan pesisir pantai, tersebar di sejumlah kecamatan di kota Makassar antara lain kecamatan Kep. Singkarrang, Ujung Tanah, Tallo dan Mariso. Selain itu, juga tersebar di pulau Lae-Lae, Barang Lompo, Barang Caddi, Kodingareng Lompi, Kodingareng Keke, Lumu-Lumu, Laikang, Bone Tambu dan beberapa pulau lainnya. Mewabahnya Covid-19 di Kota Makassar yang sampai saat ini sudah mencapai 30.195 pasien yang terkonfirmasi Covid-19 (data Perkembangan Covid-19 di kota Makassar per tanggal 29 Mei 2021). Bahkan berdasar data Covid-19 kota Makassar, persebarannya virus corona ini sudah menjangkau wilayah pulau-pulau dengan ditemukannya 31 warga pulau yang positif Covid-19 (berdasarkan data real time Satgas Covid-19 kota Makassar yang dirilis pada tanggal 29 Mei 2021). Memberi dampak yang sangat signifikan terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat di pulau-pulau, selain karena sudah mulai menyebarnya covid-19 di wilayah pulau dan pesisir pantai. Juga karena, perekonomian masyarakat pulau makin lesu dan membuat makin banyak yang jatuh miskin.

Walaupun belum ada data dan angka yang pasti mengenai jumlah nelayan di pulau-pulau dan pesisir pantai kota Makassar yang jatuh miskin karena Covid-19, tetapi dengan melihat trend kemiskinan yang terjadi di kota Makassar selama pandemi Covid-19 berlangsung tentu memberi indikasi bahwa masyarakat nelayan pun mengalami pemiskinan. Hasil kajian yang penulis lakukan menyimpulkan bahwa, makin miskinnya nelayan di pulau-pulau, karena menurunnya jumlah hasil tangkapan ikan, menurunnya harga ikan, biaya operasional melaut makin tinggi, pinjaman dana pihak ketiga yang membengkak, pembatasan sosial selama pandemi dan dampak dari penambangan pasir laut di Makassar. Hal ini semua menjadi indikator bahwa nelayan di pulau-pulau dan pesisir pantai kota Makassar, mengalami dampak sosial ekonomi yang serius dari pandemic Covid-19.

Apalagi selama ini dari sejumlah penelitian tentang kehidupan sosial ekonomi nelayan, secara umum menggambarkan bahwa kemiskinan yang dialami masyarakat nelayan cenderung bersifat absolut karena struktur sosial yang ada telah menghimpit kehidupan mereka sehingga sulit untuk keluar dari perangkap kemiskinan. Karena itu, sependapat dengan pandangan Kusnadi (2009;34), penyebab kemiskinan nelayan di Indonesia sangatlah kompleks, bisa penyebab individu, keluarga, sub budaya, agensi maupun struktur saling berkaitan. Karena, faktor pokok yang menimbulkan kemiskinan pada nelayan adalah; (a) belum adanya kebijakan, strategi dan implementasi program pembangunan kawasan pesisir dan masyarakat nelayan yang terpadu di antara para pemangku kepentingan pembangunan; (b) adanya inkonsistensi kuantitas produksi (hasil tangkapan), sehingga keberlanjutan aktivitas sosial ekonomi perikanan di desa-desa nelayan terganggu. Hal ini disebabkan oleh kondisi sumber daya perikanan telah mencapai kondisi "*over fishing*", musim paceklik yang berkepanjangan, dan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM); (c) masalah sosial geografis desa nelayan, sehingga menyulitkan keluar-masuk arus barang, jasa, kapital, dan manusia, yang mengganggu mobilitas sosial ekonomi; (d) adanya keterbatasan modal dan usaha atau modal investasi, sehingga menyulitkan nelayan meningkatkan kegiatan ekonomi perikananannya, dan; ( e ) adanya relasi sosial tingkat pendapatan rumah tangga nelayan, sehingga berdampak negatif terhadap upaya peningkatan skala usaha dan perbaikan kualitas mereka. Hal ini menggambarkan bahwa kemiskinan yang dialami masyarakat yang berada di pulau-pulau dan di pesisir pantai, jauh lebih kompleks dibanding masyarakat yang bermukim di desa pedalaman.

Sebenarnya, Pemerintah baik di tingkat pusat maupun provinsi dan kota sudah melakukan intervensi untuk mengurangi tingkat kemiskinan pada masyarakat pulau. Seperti misalnya program Bantuan Sosial Tunai (BST), program bantuan modal kerja dan program pemberdayaan bagi ibu-ibu dan perempuan pulau-pulau bahkan sampai kepada bantuan restrukturisasi terhadap pinjaman yang dimiliki nelayan di pulau dan pesisir pantai. Namun dalam kenyataannya, berbagai program yang dilaksanakan Pemerintah belum mampu memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat nelayan di pulau-pulau dan pesisir pantai.

Ironis memang, Indonesia merupakan negara maritim dan tercatat sebagai negara kepulauan dengan jumlah pulau sebanyak 17.508 buah yang dikelilingi oleh garis pantai sepanjang 81.000 Km dan luas laut sekitar 5,8 juta kilometer persegi dengan Zona ekonomi Eksklusif seluas 2.78 juta Km<sup>2</sup>. Ada sekitar 60 juta penduduk Indonesia

bermukiman di wilayah pesisir dan penyumbang sekitar 22 persen dari pendapatan bruto nasional. Namun, di tengah potensi besar lautan justru kemiskinan banyak terletak di pemukiman nelayan. Memang banyak faktor yang menyebabkan kemiskinan nelayan baik secara alamiah, struktural, maupun kultural. Secara alamiah laut memang sulit diperidiksi. Gelombang tinggi, angin kencang atau badai, serta rusaknya alam membuat hasil tangkapan semakin sedikit. Di satu sisi masyarakat nelayan mempunyai kelemahan secara struktural. Kemampuan modal yang lemah, manajemen rendah, kelembagaan yang lemah, di bawah cengkeraman tengkulak, dan keterbatasan teknologi. Kita mengetahui nelayan termasuk warga negara yang berekonomi lemah, kontras dengan perannya sebagai pahlawan protein bangsa. Kondisi kultural juga bisa mendorong nelayan semakin terjun ke jurang kemiskinan. Kekayaan alam yang besar sering meninabobokan kita semua. Ketergantungan pada sumber daya laut mengakibatkan terjadi kepasrahan, dan ini berakibat tidak adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Untuk menganalisis kajian ini, maka sependapat yang dikemukakan Michael Sherraden (2006:46-54) yang mengelompokkan kemiskinan ke dalam dua kategori yang saling bertentangan yaitu yang memfokuskan pada tingkah laku individu (behavioral) dan yang mengarah pada struktur sosial. Selain itu juga ada satu kelompok yang tidak memihak di antara keduanya (middle ground), yaitu mengenai budaya miskin. Menurutnya, teori yang memfokuskan pada tingkah laku individu merupakan teori yang menyangkut tentang pilihan, harapan, sikap, motivasi dan kapital manusia (human capital). Teori ini disajikan dalam teori ekonomi neo-klasik, yang berasumsi bahwa manusia bebas memilih keputusan untuk dirinya sendiri di atas berbagai pilihan yang ada. Perspektif ini sejalan dengan teori sosiologi fungsionalis, bahwa ketidaksetaraan itu tidak dapat dihindari dan diinginkan adalah keniscayaan dan penting bagi masyarakat secara keseluruhan. Teori perilaku individu meyakini bahwa sikap individu yang tidak produktif telah mengakibatkan lahirnya kemiskinan.

Teori Struktural yang bertolak belakang dengan teori perilaku memandang bahwa hambatan-hambatan struktural yang sistematis telah menciptakan ketidaksetaraan dalam kesempatan, dan berkelanjutannya penindasan

terhadap kelompok miskin oleh kelompok kapitalis. Variasi teori struktural ini terfokus pada topik seperti ras, gender atau ketidak sinambungan geografis dalam kaitannya atau dalam ketidakterkaitannya dengan ras. Teori budaya miskin yang dikembangkan oleh Oscar Lewis dan Edward Banfield ini mengatakan bahwa gambaran budaya kelompok kelas bawah, khususnya pada orientasi untuk masa sekarang dan tidak adanya penundaan atas kepuasan, mengekalkan kemiskinan di kalangan mereka dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Kemiskinan yang dialami nelayan juga membuat mereka rentan konflik baik internal maupun eksternal. Pelanggaran yang dilakukan nelayan berkaitan dengan pola penangkapan ikan merupakan jalan pintas untuk dapat memperoleh hasil tangkapan yang memadai. Dalam konteks masyarakat pulau-pulau di kota Makassar, hasil studi menggambarkan bahwa masalah utama dari kemiskinan yang dialami oleh kebanyakan nelayan karena umumnya mereka tidak mampu keluar dari perangkap kemiskinan yang dibuat oleh struktur sosialnya. Di sisi lain, kesadaran untuk keluar dari perangkap kemiskinan tersebut relatif rendah, ini dibuktikan dengan, masih sedikit anak-anak nelayan di pulau-pulau yang bersekolah sampai di perguruan tinggi. Umumnya mereka hanya tamat sekolah menengah pertama atau sekolah menengah atas, setelah itu mereka diminta melaut untuk membantu orang tuanya sebagai nelayan. Bahkan dalam beberapa kasus pada nelayan di pulau-pulau kota Makassar, anak-anak yang telah tamat sekolah menengah atas biasanya secepatnya dicarikan jodoh oleh orang tuanya dan dinikahkan. Itulah sebabnya pernikahan usia muda pada masyarakat nelayan di pulau-pulau masih menjadi fenomena sosial yang berlangsung sampai saat ini.

Hasil kajian ini juga menggambarkan bahwa makin tidak mampunya masyarakat nelayan di pulau-pulau kota Makassar keluar dari masalah kemiskinan saat ini, diperparah karena masa pandemi Covid-19 cukup Panjang (sudah lebih dari setahun). Pandemi ini telah mengakibatkan konsumsi rumah tangga masyarakat di kota Makassar menurun, sehingga kebutuhan terhadap protein ikan dan hewan laut lainnya yang selama ini dikonsumsi masyarakat juga menurun bahkan disubsitisi ke telur atau sayuran. Pola konsumsi masyarakat yang berubah, membuat pendapatan nelayan pun mengalami penurunan. Padahal dalam proses produksi (penangkapan ikan dan lain-lain), biaya produksinya tetap bahkan cenderung meningkat. Begitu juga dengan pembatasan selama masa pandemi, membuat para nelayan juga mengatur jadwal melautnya dan tidak tiap hari lagi seperti

biasanya. Kesemua ini, menjadi faktor-faktor yang bisa menjelaskan kondisi sosial ekonomi nelayan di pulau-pulau kota Makassar.

Terkait dengan karakteristik ekonomi masyarakat miskin, Menurut Primahendra (2001,h.1), fenomena ekonomi masyarakat miskin ditandai oleh dua karakteristik utama. *Pertama*, skala ekonomi yang berkembang diantara rakyat miskin adalah skala ekonomi mikro. Mereka mendapatkan penghasilan, melakukan transaksi dan melakukan investasi dalam skala mikro. *Kedua*, kehidupan ekonomi mereka diwarnai tingginya risiko dan ketidakamanan sebagai akibat dari jenis aktivitas mereka yang bersifat informal, subsiten dan marjinal.

Untuk dapat bertahan dalam lingkungan ekonomi yang tidak ideal tadi, rakyat miskin mengembangkan beberapa mekanisme. Menurut hasil penelitian di daerah miskin pinggiran kota Jakarta yang dilakukan oleh Primahendra (2001,h.3), paling tidak ada tiga mekanisme yang biasa dilakukan masyarakat miskin untuk mengembangkan ekonominya. *Pertama*, mekanisme distribusi risiko. Artinya, mereka sadar bahwa risiko seperti kehilangan pekerjaan, sakit dan semacamnya apabila ditanggung sendirian sangat berat dan hampir tidak mungkin tertanggungkan. Oleh karena itu, mereka mengembangkan kebersamaan dalam berbagai institusi lokal dan tradisional. Keberadaan institusi seperti gotong royong, tanggung renteng atau pun ‘sithij ending’ (mekanisme berbagai dakam keterbatasan) mampu mendukung rakyat miskin melalui berbagai situasi krisis ekonomi yang dihadapi.

*Kedua*, mekanisme pemanfaatan modal sosial sebagai pengganti modal fisik dan modal finansial yang memang sangat terbatas. Modal sosial yang secara positif terbentuk seperti kepercayaan dan hubungan baik, maupun yang secara negatif seperti pengucilan dan akses komunikasi sebagai bentuk hukuman sosial (social punishment) terbukti mampu secara efektif menggantikan biaya-biaya seperti transaksi dan jaminan fisik (collateral). *Ketiga*, mekanisme aktivitas simpan pinjam dalam berbagai bentuk yang seringkali juga difungsikan sebagai oleh berbagai kelompok masyarakat. Arisan, lumbung desa, lumpung pitih nagari, jimpitan dan berbagai bentuk aktivitas pinjam lain telah menjadi mekanisme yang hidup di masyarakat selama beberapa dasawarsa.

Jika dilihat dari kebutuhan finansial yang urgen bagi masyarakat miskin, menurut Primahendra (2001,h.10) maka tergambar bahwa ada tiga kebutuhan utama mereka yakni kebutuhan siklus kehidupan (life cycle needs), kebutuhan darurat (emergency needs) dan kebutuhan untuk memanfaatkan peluang (opportunity needs). Kebutuhan siklus kehidupan pembiayaan yang tidak sedikit. Pembiayaan berbagai jenis pengeluaran tersebut seringkali melebihi kemampuan rakyat miskin. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, jelas mereka membutuhkan sumber dana dari luar. Dengan mencoba menganalisis kondisi sosial ekonomi masyarakat nelayan di pulau-pulau

kota Makassar yang sekarang ini masih dilingkupi situasi pandemic Covid-19, maka perlu ada alternatif akselerasi agar masyarakat nelayan tidak semakin terjebak dalam kondisi kemiskinan yang berkepanjangan. Salah satu upaya akseleratif yang dilaksanakan Pemerintah adalah dengan mengintrodusir kebijakan dan program SDGs (Sustainability Development Goals) desa. Yaitu suatu format kebijakan yang mengadopsi konsep SDGs Global (Dunia) dan SDGs nasional. Pemerintah melalui Kemendes menurunkan SDGs nasional menjadi SDGs desa berdasarkan peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 13 tahun 2020 yang menyatakan bahwa Rp 72 triliun dana desa tahun 2021 diarahkan untuk mencapai tujuan tujuan SDGs desa. SDGs desa diharapkan menjadi acuan untuk pembangunan desa 2020-2024. SDGs desa adalah pembangun total atas desa yang mencakup seluruh sendiri kehidupan di desa yang berbasis pada keunggulan dan kearifan lokal. Salah satu cirikhas dari SDGs desa karena mempertimbangkan faktor kearifan lokal yang tidak dipertimbangkan pada SDGs global dan SDGs nasional. Fokus SDGs desa adalah pada aspek pemulihan ekonom nasional, pengembangan desa wisata dan penguatan ketahanan pangan, dan adaptasi kebiasaan baru yaitu desa aman Covid-19. Namun kebijakan akseleratif tersebut untuk menurunkan tingkat kemiskinan pada masyarakat nelayan di pulau-pulau kota Makassar, implementasinya bukanlah perkara gampang. Banyak tantangan dan hambatan yang muncul, salah satunya adalah perangkap kemiskinan yang selama ini dibuat oleh pemilik modal (punggawa) di masyarakat nelayan dengan mengekalkan struktur sosial yang sangat menguntungkan mereka, masih sulit ditembus. Di sisi lain, sikap mental masyarakat nelayan miskin di pulau-pulau yang pasrah terhadap keadaan, tidak mampu berinovasi, dan menggantungkan hidupnya pada “punggawa”, juga menjadi faktor penghambat untuk melakukan akselerasi kebijakan seperti SDGs desa. Dengan demikian maka, akselerasi kebijakan SDGs desa

harus mengembangkan prinsip kebersamaan, keterpaduan, keikutsertaan semua masyarakat, dan kemandirian.

## **PENUTUP**

Dari penggambaran di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat nelayan di pulau-pulau adalah kelompok sosial yang mengalami dampak social ekonomi yang sangat parah dibandingkan kelompok sosial lainnya khususnya selama masa pandemic Covid-19 berlangsung sampai sekarang ini. Kondisi ini bukan hanya karena pengaruh Covid-19 saja, tetapi sejak lama struktur sosisl yang ada pada masyarakat nelayan di pulau-pulau Makassar menyebabkan banyak nelayan yang terhimpit dalam perangkap kemiskinan.

Karena itu, problematika kemiskinan pada masyarakat nelayan yang bermukim di pulau-pulau dan pinggiran pantai memerlukan kebijakan yang akseleratif agar kemiskinan di pukau-pulau dapat diminimalisir dan kalau perlu dihilangkan, SDGs sebagai salah satu alternatfi kebijakan akseleratif, diharapkan mampu menjawab problematika kemiskinan di wilayah pulau-pulau kota Makassar.

## **REFERENSI**

- Biro Pusat Statistik (BPS), 2020. “ Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 2020 “. BPS Sulawesi Selatan
- Makassar Kusnadi, 2009. *Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir*. Penerbit Ar-Ruz Media
- Jogjakarta Kusnadi, 2003. *Akar Kemiskinan Nelayan*. Yogyakarta, LKIS
- Levin, Melvin R, 1977. *Community and Regional Planning; Issues In Public Policy*. USA Preager Publisher New York
- Primahendra, Riza dan Martono, Malakias & Nggao, Ferdy S, 2003. *Kemiskinan dan Kemandirian*. Jakarta – Yayasan Bina Swadaya
- Ritzer, George and Douglas J. Goodman, 2008. *Teori Sosiologi; Dari Teori Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Post Modern*. Yogyakarta, Kreasi Wacana
- Satria, Arif, 2009. *Pesisir dan Laut Untuk Rakyat*. Bogor, IPB Press